

KATALOG : 1102001.3502

STATISTIK DAERAH KABUPATEN PONOROGO 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PONOROGO**

STATISTIK DAERAH KABUPATEN PONOROGO 2018

b.bps.go.id



STATISTIK DAERAH KABUPATEN PONOROGO 2018

Katalog	: 1102001.3502
No. Publikasi	: 35020.1826
Ukuran Buku	: 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman	: vi + 36 halaman
Naskah	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo
Penyunting	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo
Desain Kover	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo
Diterbitkan oleh	: @Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo
Dicetak oleh	: CV. Azka Putra Pratama

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum :

Ir. Siswi Harini, M.Si.

Penyunting :

Tutik Handayani, S.ST.

Indria Sasono

Dwiyono Suprayitno

Penulis :

Wahyu Tri Mulatsih, S.ST.

Pengolah Data :

Wahyu Tri Mulatsih, S.ST.

Gambar Kulit :

Tutik Handayani, S.ST.



Kata Pengantar

Publikasi **Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2018** yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar Kabupaten Ponorogo yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Publikasi **Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2018** diterbitkan untuk melengkapi publikasi-publikasi statistik yang telah terbit secara rutin setiap tahun. Berbeda dengan publikasi-publikasi yang sudah ada, publikasi ini lebih menekankan pada analisis deskriptif.

Materi yang disajikan dalam **Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2018** memuat berbagai informasi/indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Ponorogo dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Kritik dan saran konstruktif berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas.

Ponorogo, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Ponorogo,

Siswi Harini





DAFTAR ISI

1. Geografi dan Iklim	1
2. Pemerintahan	2
3. Penduduk	4
4. Ketenagakerjaan	6
5. Pendidikan	7
6. Kesehatan	8
7. Perumahan dan Lingkungan	9
8. Pembangunan Manusia	10
9. Pertanian	11
10. Energi	14
11. Industri Pengolahan	15
12. Hotel dan Pariwisata	16
13. Transportasi dan Komunikasi	17
14. Perbankan dan Investasi	18
15. Pengeluaran Penduduk	19
16. Perdagangan	20
17. Pendapatan Regional	21
18. Perbandingan Regional	22
Lampiran	25



GEOGRAFI DAN IKLIM

1

Kabupaten Ponorogo terletak pada koordinat antara $111^{\circ} 17' - 111^{\circ} 52'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 49' - 8^{\circ} 20'$ Lintang Selatan mempunyai wilayah seluas 1.371,78 km². Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk di sebelah utara, Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek di sebelah timur, Kabupaten Pacitan di sebelah Selatan serta Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah) di sebelah Barat.

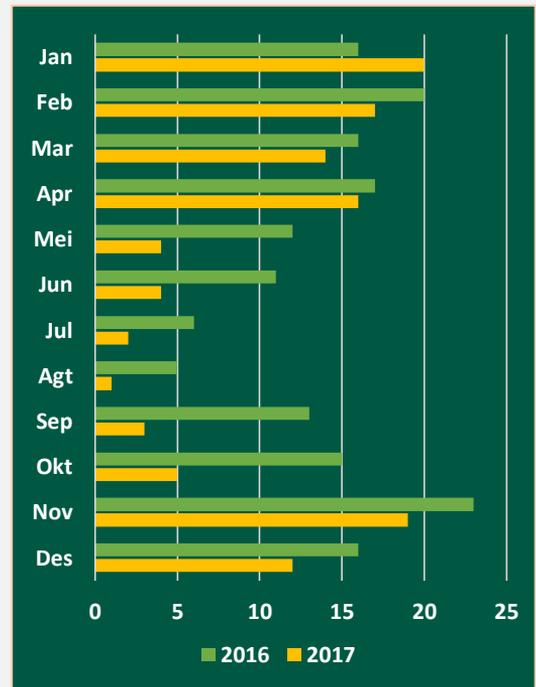
Dilihat dari keadaan topografinya sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo (79 persen) merupakan daerah dataran, 21 persen lainnya daerah lereng/puncak pegunungan yang mencakup Kecamatan Ngrayun, Ngebel, Sooko, Pudak, dan Pulung. 242 desa terletak pada ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, sedangkan 45 desa terletak di antara 500-700 meter di atas permukaan laut. Sementara 20 desa lainnya terletak di atas 700 meter dari permukaan laut.

Rata-rata temperatur suhu udara di wilayah Kabupaten Ponorogo berkisar antara 18 hingga 31 derajat celsius. Untuk dataran rendah bersuhu 18 – 26 derajat celsius, sementara di dataran tinggi bersuhu 27 -31 derajat celcius.

Rata-rata jumlah curah hujan tahun 2017 mencapai 2.056 mm per tahun, lebih rendah dibanding tahun 2016 yang sebesar 2.958 mm. Jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November yaitu 390 mm dan bulan Februari yaitu 365 mm. Sementara bulan Juli dan Agustus jumlah curah hujannya dibawah 50 mm per bulan.



Rata-Rata Hari Hujan Per Bulan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2017

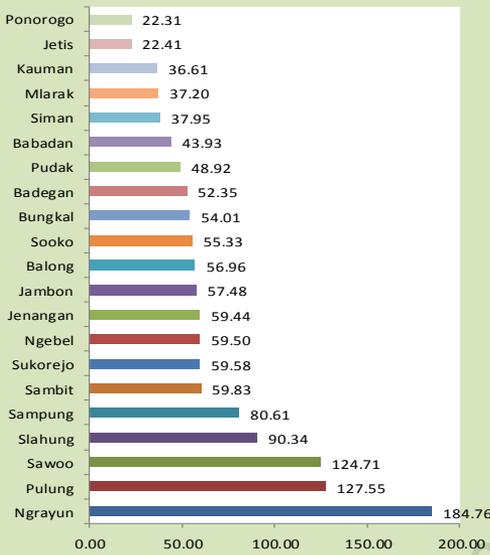


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Ponorogo

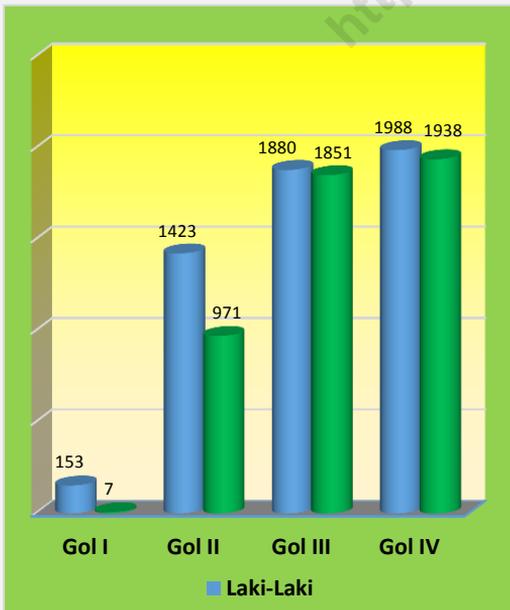


PEMERINTAHAN

Luas Wilayah Per Kecamatan (Km²)



PNS Menurut Golongan Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017



Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Ponorogo

Secara administratif wilayah Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 21 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 307 kelurahan/desa, 1.002 Lingkungan/Dusun, 2.274 RW dan 6.869 RT.

Jumlah perangkat kelurahan/desa sebanyak 3.337 orang yang terdiri dari 307 Lurah/Kepala Desa, 24 Sekretaris Kelurahan/Desa, 808 Kaling/Kasun/Kamituwo dan 2.198 petugas urusan teknis desa lainnya. Jumlah perangkat terbanyak berada di desa/kelurahan Kecamatan Pulung yang mencapai 298 orang.

Untuk menjalankan roda pemerintahan di wilayah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 tercatat jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 10.211 orang dengan komposisi PNS pria (53 persen) lebih banyak dari PNS wanita (47 persen). Jumlah PNS terus menurun dari tahun ke tahun akibat kebijakan moratorium PNS yang masih diberlakukan, sementara tidak ada penggantian bagi PNS yang memasuki masa pensiun.

Menurut tingkat pendidikannya, sebagian besar PNS adalah lulusan perguruan tinggi dengan persentase sebesar 77 persen. Sejalan dengan tingkat pendidikannya maka komposisi golongan kepangkatan juga didominasi oleh PNS golongan IV sebesar 38 persen dan golongan III sebesar 37 persen. Jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2017 mencapai 959,45 milyar rupiah atau 42,88 persen dari total realisasi belanja daerah. Dibanding tahun 2016 persentase realisasi belanja pegawai turun 8,52 persen terhadap total belanja daerah.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2017 mencapai 2,22 triliun rupiah dengan sumber terbesar berasal dari pendapatan transfer (80,94 persen). Pendapatan Asli Daerah naik 28,37 persen dibanding tahun 2016, yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sementara realisasi pendapatan transfer meningkat 9,40 persen dibanding tahun sebelumnya, terutama yang bersumber dari transfer pemerintah pusat lainnya (naik 27,33 persen).

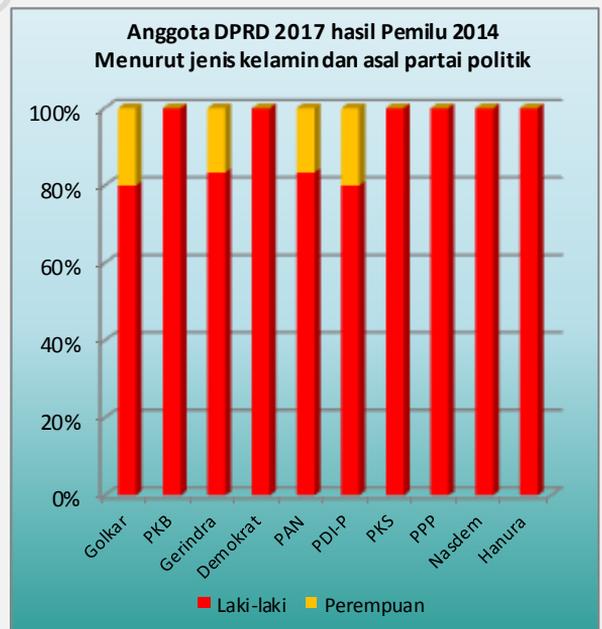
Realisasi belanja daerah tahun 2017 mencapai 2,24 triliun rupiah, naik 6,51 persen dibanding tahun 2016. Jenis belanja operasional masih memegang porsi terbesar yaitu 78,78 persen. Namun peningkatan signifikan terjadi pada belanja modal (naik 23,61 persen dibanding tahun 2016).

Berdasarkan hasil Pemilu 2014 jumlah anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun 2017 adalah sebanyak 44 orang dengan mayoritas anggota (20 persen) berasal dari Partai Golongan Karya (Golkar). Dari total 44 anggota DPRD, keterwakilan perempuan hanya sebesar 11 persen saja. Hal ini masih jauh dari yang diamanatkan oleh UU no. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan UU no.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol) bahwa kuota keterwakilan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30 persen).

Realisasi Pendapatan dan Belanja Keuangan Daerah di Kabupaten Ponorogo

Pendapatan/ Belanja	2016	2017
Pendapatan	2.026.630.419.498,86	2.215.197.920.702,07
• PAD	240.110.887.273,88	308.232.104.639,07
• Transfer	1.638.946.817.771,00	1.792.943.603.063,00
• Lain-lain	147.572.714.453,98	114.022.213.000,00
Belanja	2.100.663.035.697,90	2.237.311.676.081,47
• Operasional	1.708.288.913.105,90	1.762.481.933.761,94
• Modal	376.402.638.867,00	465.255.813.618,53
• Tidak Terduga	8.983.120.365,00	1.716.038.200,00
• Transfer	6.988.363.360,00	7.857.890.501,00
Surplus/Defisit	(74.032.616.199,04)	(22.113.755.379,40)

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Ponorogo

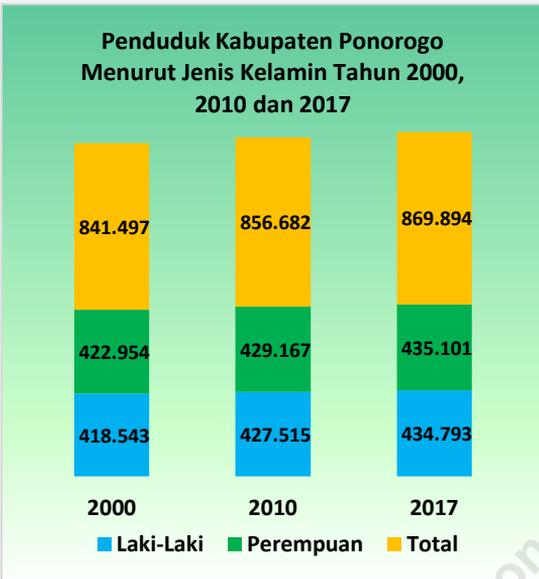


PARTAI	Golkar	PKB	Gerindra	Demokrat	PAN	PDI-P	PKS	PPP	Nasdem	Hanura
Laki-laki	7	7	5	6	5	4	2	1	1	1
Perempuan	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Ponorogo



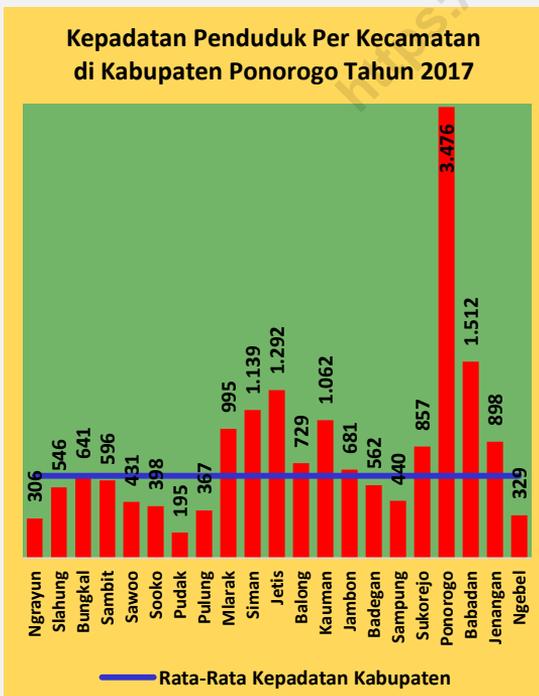
PENDUDUK



Sumber : Hasil SP 2000, SP 2010 & Proyeksi 2017

Dalam satu dekade terakhir periode 2000 hingga 2010 jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo meningkat 1,64 persen dengan *sex ratio* (perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan) 98,96 pada tahun 2000 dan 99,98 pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa pada dekade 2000 hingga 2010 secara rata-rata perkembangan jumlah penduduk perempuan lebih lambat dibanding perkembangan penduduk laki-laki.

Sementara pada tahun 2017 jumlah penduduk mencapai 869.894 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 434.793 jiwa dan penduduk perempuan 435.101 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2016-2017 sebesar 0,12 persen dengan *sex ratio* sebesar 99,93. Laju pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kecamatan Puduk (0,90 persen). *Sex ratio* tertinggi berada di Kecamatan Mlarak yang mencapai 127,58.



Sumber : Hasil Proyeksi 2017

Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Ponorogo yaitu 77.545 jiwa atau sebesar 8,91 persen dari total penduduk di Kabupaten Ponorogo, disusul Kecamatan Babadan (7,64 persen) dan Kecamatan Ngrayun (6,51 persen).

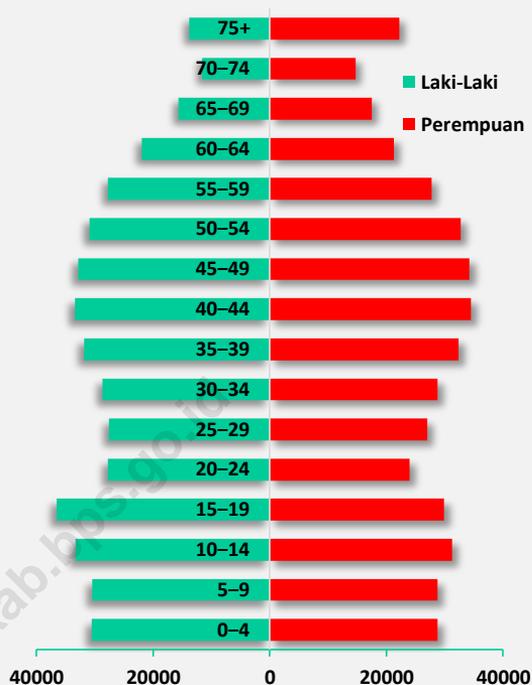
Kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 tercatat 634 jiwa/Km². Kecamatan Ponorogo merupakan kecamatan terpadat dengan kepadatan 3.476 jiwa/Km². Sementara wilayah yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Puduk yaitu 195 jiwa/Km².

Menurut komposisinya, mayoritas penduduk Kabupaten Ponorogo berada pada usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai 68,00 persen. Sementara persentase penduduk usia muda (0-14 tahun) dan penduduk usia tua (65 tahun ke atas) masing-masing 21,02 persen dan 10,98 persen. Penduduk lanjut usia mayoritas berjenis kelamin perempuan (54,51 persen). Angka rasio ketergantungan di Kabupaten Ponorogo mencapai 47,06 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk yang produktif harus menanggung sekitar 47 penduduk yang tidak produktif.

Angka Harapan Hidup yang bermakna rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi baru lahir di tahun 2017 mencapai 72,27 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup mencerminkan keberhasilan program kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi yang telah dilaksanakan.

Jumlah peserta Keluarga Berencana aktif pada tahun 2017 sebanyak 112.028 peserta, menurun tajam sebesar 23,29 persen dibanding tahun 2016. Metode kontrasepsi yang paling banyak diminati kini adalah suntik (37,72 persen), terlihat dari kurun waktu 5 tahun terakhir peserta KB aktif cenderung beralih ke alat kontrasepsi jenis implant dan suntik.

Piramida Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2017



Sumber : Hasil Proyeksi 2017

Angka Harapan Hidup Kabupaten Ponorogo



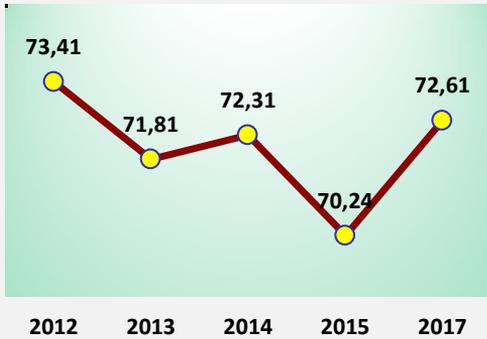
Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
IUD	58.231	54.050	55.058	54.499	38.765
M O	9.295	9.464	9.578	9.539	7.758
Implant	11.512	11.326	12.508	13.376	11.370
Pil	11.775	11.325	12.078	11.708	8.779
Suntik	47.506	49.069	51.679	52.429	42.253
Kondom	4.886	4.250	4.514	4.494	3.103
JUMLAH	143.205	139.484	145.415	146.045	112.028

Sumber : Badan Keluarga Berencana Kab. Ponorogo

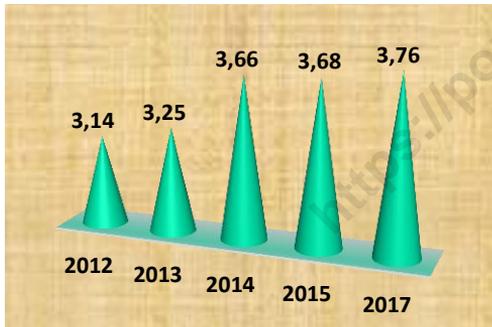


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Ponorogo 2012-2017



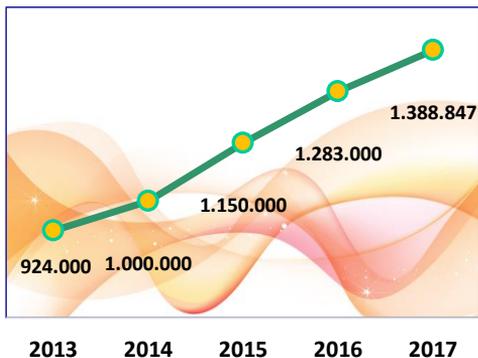
Jumlah angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) di Kabupaten Ponorogo pada Agustus 2017 mencapai 506.848 orang atau 72,61 persen dari jumlah penduduk usia kerja (TPAK), menurun 2,37 persen bila dibanding tahun 2015.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ponorogo 2012-2017



Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2017 adalah 3,76 persen, lebih tinggi dibanding Agustus 2015 (3,68 persen). TPT pada penduduk laki-laki (3,17 persen) lebih rendah dibandingkan TPT pada penduduk perempuan (4,56 persen).

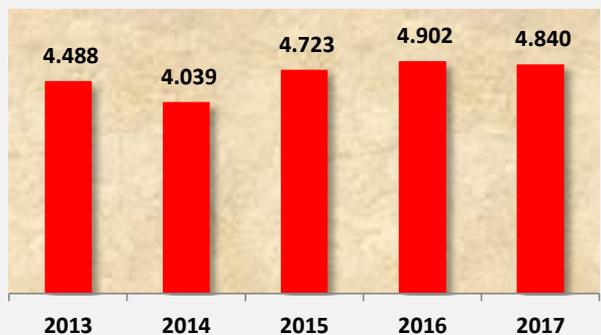
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2017



Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Ponorogo terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 1,39 juta rupiah per orang per bulan pada tahun 2017 (naik 8,25 persen dibanding 2016).

Jumlah TKI/TKW yang bekerja ke luar negeri pada tahun 2017 sebanyak 4.840 orang (menurun 1,26 persen dibanding 2016) dengan negara tujuan utama Taiwan dan Hongkong. Jumlah TKI/TKW pada tahun 2017 didominasi oleh tenaga kerja laki-laki sebesar 73,82 persen dari seluruh pekerja ke luar negeri.

Jumlah Tenaga Kerja ke Luar Negeri (TKI/TKW) Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2017



Sumber : Sakernas Agustus 2012-2017 (Data 2016 tidak tersedia)

Sumber : Dinas Sosnakertrans Kab. Ponorogo



PENDIDIKAN

5

Ketersediaan sarana maupun prasarana pendidikan baik berupa fisik maupun non fisik yang memadai merupakan upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Jumlah murid pada tingkat sekolah dasar sederajat tahun 2017 menurun sekitar 1,12 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara jumlah murid sekolah menengah tingkat pertama dan tingkat atas justru meningkat dibanding 2016, masing-masing sebesar 11,74 persen dan 7,33 persen.

Berdasarkan hasil Susenas 2017, 97,39 persen penduduk usia 7-12 tahun telah terserap di sekolah tingkat SD/MI yang tercermin melalui Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI. Namun untuk penduduk usia 13-15 tahun baru 81,51 persen yang terserap di sekolah tingkat SMP/MTs dan penduduk usia 16-18 tahun hanya 69,27 persen yang telah terserap di sekolah tingkat SMA/SMK/MA.

Penduduk usia 7-24 tahun yang statusnya masih bersekolah cukup tinggi yaitu 75,03 persen. Sementara yang tidak bersekolah lagi sebanyak 24,75 persen dan yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 0,22 persen.

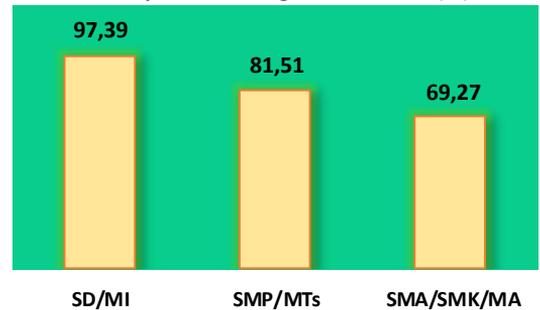
Bila dibedakan menurut jenis kelaminnya ternyata persentase penduduk perempuan usia 7-24 tahun yang masih bersekolah lebih tinggi (76,45 persen) dibanding penduduk laki-laki (73,76 persen). Namun tidak ada penduduk laki-laki yang statusnya tidak/belum pernah sekolah.

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Guru Murid
SD	599	61.909	6.093	1 : 10
SLTP	91	24.684	2.164	1 : 11
SLTA	27	10.900	914	1 : 12
SMK	46	16.115	1.270	1 : 13
MI	96	13.394	1.094	1 : 12
MTs	83	15.521	1.758	1 : 9
MA	64	10.464	1.335	1 : 8

Sumber : Dinas Pendidikan & Kantor Departemen

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 (%)



Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017

Jenis Kelamin	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
Laki-laki	0,00	73,76	26,24
Perempuan	0,46	76,45	23,09
Laki-laki + Perempuan	0,22	75,03	24,75

Sumber : Statkesra Provinsi Jatim 2017

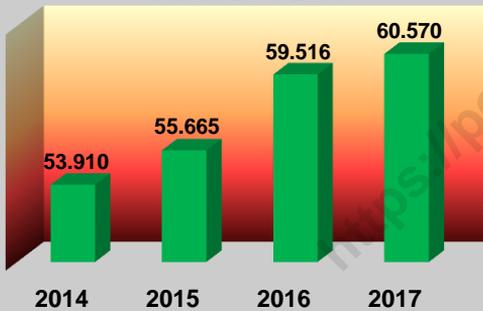


Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Ponorogo Tahun 2014-2017

Tenaga Medis	2014	2015	2016	2017
Dokter Spesialis	39	51	50	50
Dokter Umum	84	80	72	73
Dokter Gigi	24	25	23	29

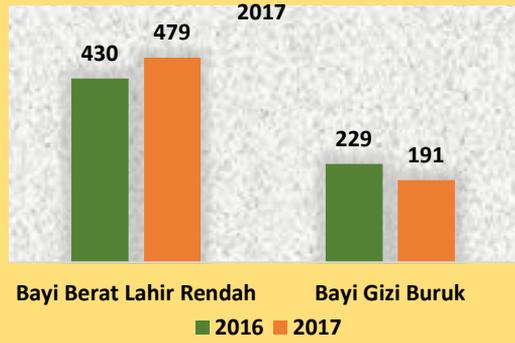
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo

Jumlah Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Kabupaten Ponorogo Tahun 2014-2017



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo

Jumlah Bayi Berat Lahir Rendah dan Bayi dengan Gizi Buruk Tahun 2016-2017



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting di dalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat sarana kesehatan maupun tenaga medis yang memadai mutlak diperlukan.

Pada tahun 2017 jumlah rumah sakit yang beroperasi sebanyak 6 unit dengan tempat tidur tersedia mencapai 955 buah. Ketersediaan jumlah tempat tidur ini meningkat 1,06 persen dibanding tahun 2016.

Jumlah tenaga medis yang ada di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 sebanyak 152 orang, terdiri dari 50 dokter spesialis, 73 dokter umum dan 29 dokter gigi. Bila dikaitkan dengan jumlah penduduk berarti secara rata-rata terdapat 1 orang tenaga medis untuk melayani 5.723 penduduk.

Jumlah pasien rawat inap di seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 mencapai 60.570 pasien, meningkat sebesar 1,77 persen dari tahun 2016. Kasus penyakit terbanyak tahun 2016 adalah jenis Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), namun tahun 2017 beralih menjadi jenis Penyakit pada Sistem Otot dan Jaringan Pengikat yang jumlah kasusnya mencapai 136.974 kasus (naik 56,22 persen).

Dari jumlah bayi lahir sebanyak 11.013 bayi di tahun 2017, 4,35 persen diantaranya lahir dengan berat badan rendah. Sementara bayi dengan gizi buruk tercatat sebanyak 191 bayi, menurun 16,59 persen dibanding tahun 2016.

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

7

Kondisi perumahan dengan segala fasilitas serta lingkungannya dapat menjadi gambaran kondisi sosial ekonomi serta kesehatan suatu masyarakat. Oleh karena itu keberadaan sanitasi menjadi sangat penting di setiap rumah tangga.

Kebutuhan akan air bersih sangat krusial bagi masyarakat, terutama untuk keperluan air minum dan memasak. Air bersih sangatlah penting untuk kelangsungan hidup manusia. Jumlah penduduk yang terus bertambah membuat keperluan air minum bertambah pula.

Pengaruh air terhadap kesehatan sangat tergantung pada kualitas air yang dikonsumsi. Pada tahun 2017, sebagian besar rumah tangga menggunakan sumber air minum yang berasal dari sumur bor/pompa (33,90 persen). Sementara sumber air minum dari sumur tak terlindung dan mata air tak terlindung yang kurang terjaga kualitasnya masih digunakan oleh 5,49 persen rumah tangga.

Jenis lantai rumah juga berpengaruh terhadap kualitas sanitasi rumah tangga. Ternyata di tahun 2017 masih ada penduduk Kabupaten Ponorogo yang tinggal di rumah berlantai tanah (11,74 persen).

Mayoritas rumah tangga pada tahun 2017 masih menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 100 m² yang mencapai 62,64 persen. Sementara rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai antara 100-149 m² sebanyak 26,46 persen dan sisanya (10,90 persen) menempati rumah dengan luas lantai di atas 150 m².

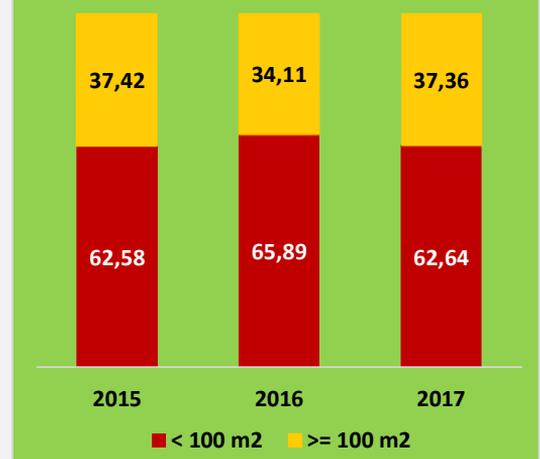
Persentase Penggunaan Sumber Utama Air Minum di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017

Sumber Air Minum	Persentase
Air kemasan bermerk	8,49
Air isi ulang	7,20
Leding	8,34
Sumur bor/pompa	33,90
Sumur terlindung	23,84
Sumur tak terlindung	1,39
Mata air terlindung	12,80
Mata air tak terlindung	4,10

Sumber : Data Susenas 2017

Pada tahun 2017 sekitar 11,74 persen rumah tangga di Kabupaten Ponorogo masih menempati rumah dengan lantai tanah.

Persentase Rumah Menurut Luas Lantai di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2017



Sumber : Data Susenas 2015-2017



**Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2017**



Klasifikasi IPM :

- Rendah : IPM < 60
- Sedang : $60 \leq \text{IPM} < 70$
- Tinggi : $70 \leq \text{IPM} < 80$
- Sangat Tinggi : IPM ≥ 80

**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten
Ponorogo Tahun 2013-2017**



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan Indeks yang mengukur pencapaian pembangunan manusia yang direpresentasikan oleh 3 dimensi, yaitu : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM merepresentasikan kesempatan warga masyarakat untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan di suatu daerah.

IPM Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 mengalami peningkatan meskipun masih berada pada kategori sedang dengan nilai 69,26. Namun demikian IPM Kabupaten Ponorogo masih berada di bawah IPM Jawa Timur yang mencapai 70,27.

Pertumbuhan pencapaian IPM Kabupaten Ponorogo selama 2016-2017 sebesar 0,48 persen, jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan periode sebelumnya (1,13 persen). Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo menempati peringkat 23 dalam hal pencapaian IPM.

Meski IPM meningkat namun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo masih cukup banyak karena usaha pengentasan kemiskinan tidaklah sederhana, meliputi perbaikan berbagai aspek sosial dan ekonomi yang kompleks.

Persentase penduduk miskin yang ada di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 mencapai angka 11,39 persen atau sekitar 99,03 ribu jiwa, menurun dibanding tahun sebelumnya (102,06 ribu jiwa).



PERTANIAN

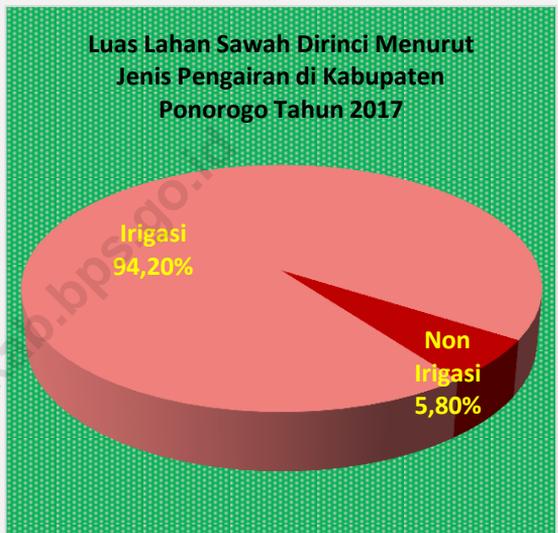
9

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Timur. Luas lahan sawah pada tahun 2017 masih tetap 34.801 Ha yang terdiri dari sawah irigasi seluas 32.781 Ha dan sawah non irigasi seluas 2.020 Ha.

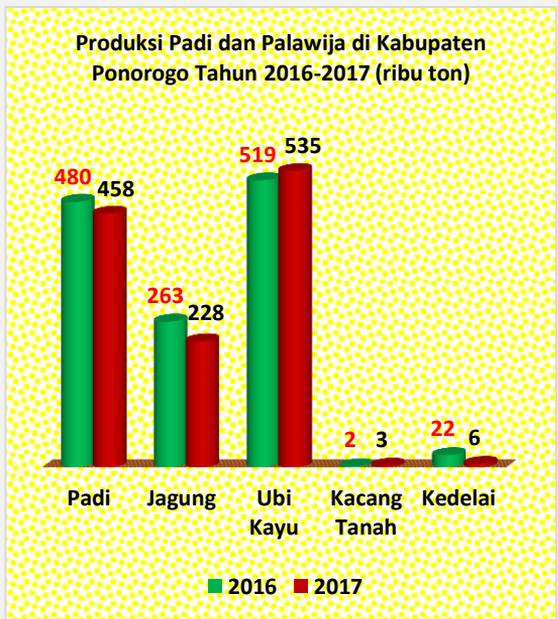
Luas lahan sawah irigasi terbanyak berada di Kecamatan Sukorejo dengan luas 3.374 Ha (10,29 persen). Sementara luas lahan sawah non irigasi paling banyak terdapat di Kecamatan Ngrayun seluas 771 Ha (38,17 persen).

Luas panen tanaman padi pada tahun 2017 mencapai 79.932 hektar, meningkat 1,07 persen dibanding tahun sebelumnya. Terjadinya serangan hama dan penyakit pada tahun 2017 menyebabkan tanaman padi tidak mampu memproduksi secara optimal, sehingga produksi padi juga menurun 4,50 persen dibanding tahun 2016. Demikian pula produksi jagung menurun 13,54 persen dari 263 ribu ton pada tahun 2016 menjadi 228 ribu ton di tahun 2017 akibat penurunan luas panen.

Sedangkan produksi ubi kayu mengalami sedikit peningkatan dari 519 ribu ton di tahun 2016 menjadi 535 ribu ton di tahun 2017. Demikian pula produksi kacang tanah mengalami peningkatan sebesar 55,89 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun kondisi sebaliknya terjadi pada kedelai yang menurun drastis dari 22 ribu ton menjadi hanya 6 ribu ton akibat penurunan luas panen dan produktivitas.



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo

**Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat
Menurut Jenis Tanaman Tahun 2016 - 2017 (Ton)**

Komoditi	2016	2017
Tebu	6.595,5	8.160,4
Tembakau	315,5	613,6
Kelapa	5.666,3	6.960,0
Kopi	230,2	207,7
Cengkeh	233,3	250,1
Kakao	689,8	647,1
Jahe	14.480,6	7.725,2
Lengkuas	973,8	1.285,1
Kunyit	7.718,5	7.494,6
Temulawak	1.237,3	1.090,7

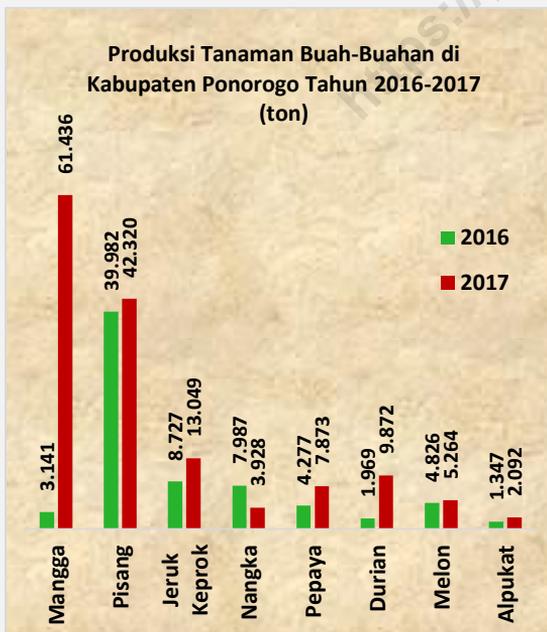
Produksi tanaman perkebunan utama seperti tebu, tembakau, kelapa, cengkeh di tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding tahun 2016. Namun produksi kopi dan kakao mengalami penurunan. Produksi kopi turun dari 230,2 ton menjadi 207,7 ton, sementara kakao turun dari 689,8 ton menjadi 647,1 ton.

Sementara untuk tanaman biofarmaka yang cukup dominan di Kabupaten Ponorogo adalah jahe dan kunyit. Produksi tanaman ini pada tahun 2017 juga menurun dibanding tahun sebelumnya dengan jumlah produksi sebesar 7.725,2 ton jahe dan 7.494,6 ton kunyit.

Selain tanaman perkebunan, Kabupaten Ponorogo juga merupakan penghasil tanaman buah-buahan seperti mangga, pisang, jeruk keprok, nangka, pepaya, durian, melon dan alpukat.

Curah hujan yang lebih rendah di tahun 2017 dibandingkan pada tahun 2016 berpengaruh positif terhadap produksi tanaman buah-buahan. Hampir seluruh komoditi buah-buahan potensial naik produksinya, terutama mangga yang naik drastis sampai 1.856 persen dibanding tahun 2016.

Komoditi sayuran yang mengalami peningkatan produksi cukup dominan adalah bawang merah (naik 97,66 persen) dan melinjo (naik 67,52 persen) dibanding tahun 2016. Sementara produksi buncis menurun cukup drastis dari 7 ribu ton (tahun 2016) menjadi 3 ribu ton (tahun 2017).



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo

Produksi perikanan darat yang utama di Kabupaten Ponorogo adalah budidaya ikan di kolam (95,70 persen) sementara penangkapan/budidaya ikan di perairan umum hanya mencakup 4,30 persen saja.

Jenis ikan di kolam budidaya yang banyak diusahakan adalah gurami, lele dan nila. Namun yang produksinya paling besar adalah ikan lele dengan jumlah produksi di tahun 2017 mencapai 1.606 ton. Jumlah ini meningkat 7,97 persen dibanding tahun 2016.

Populasi ternak besar mengalami penurunan dan kenaikan dibanding tahun 2016. Populasi sapi potong menurun 0,34 persen dari tahun 2016 sedangkan sapi perah naik sebesar 9,51 persen.

Namun populasi ternak kecil secara total terjadi peningkatan. Penurunan terjadi pada populasi domba yang turun 19,57 persen dibanding tahun 2016, sementara populasi kambing yang merupakan komoditi dominan naik 5,84 persen.

Populasi ternak unggas secara umum mengalami peningkatan rata-rata 8,87 persen. Jenis unggas burung puyuh populasinya naik signifikan mencapai 181,24 persen dibanding tahun sebelumnya.

Produksi hasil-hasil peternakan terutama telur dan susu di tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding tahun 2016. Peningkatan produksi tersebut searah dengan bertambahnya populasi ternak penghasil susu dan unggas penghasil telur.



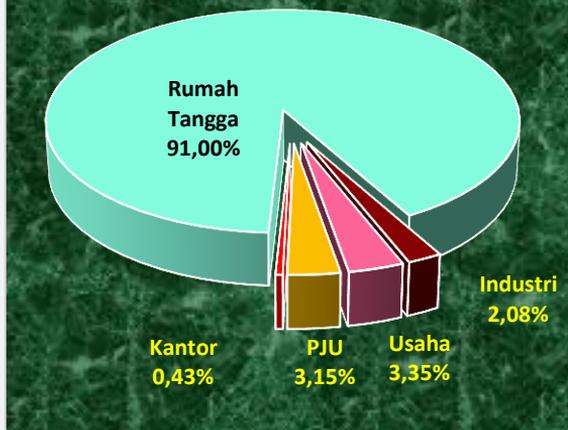
Populasi dan Produksi Ternak di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2017

Uraian	2016	2017
Populasi Ternak (ekor)		
1. Sapi Potong	82.102	81.823
2. Sapi Perah	2.177	2.384
3. Kambing	194.583	205.942
4. Domba	20.926	16.830
5. Ayam Kampung	846.479	681.215
6. Itik	80.052	83.699
7. Mentok	26.393	28.424
8. Kelinci	6.315	8.585
9. Burung Puyuh	146.350	411.600
10. Merpati	11.076	7.503
11. Ayam Ras Petelur	323.146	348.201
Produksi Ternak		
1. Daging (kg)	6.331.680	5.389.193
2. Telur (kg)	2.824.150	4.522.017
3. Susu (liter)	2.512.373	4.655.203

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo

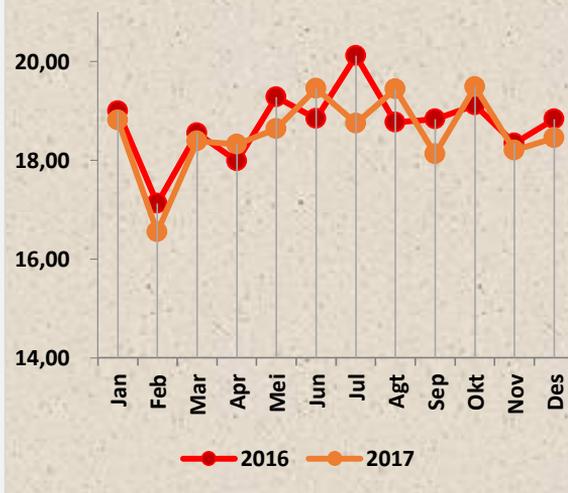


Persentase Pelanggan Listrik Menurut Golongan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017



Sumber : PT PLN Persero Area Ponorogo

Jumlah Pemakaian Listrik Rumah Tangga di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2017 (juta KWH)



Sumber : PT PLN Persero Area Ponorogo

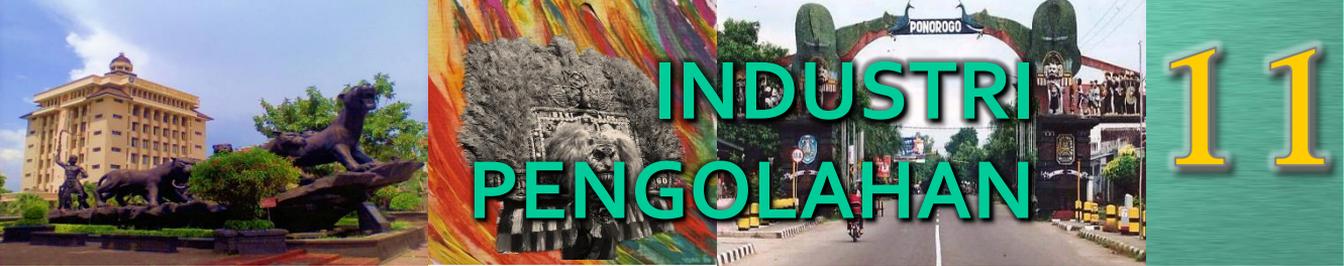
Energi listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumahtangga maupun dunia usaha. Di Kabupaten Ponorogo kelompok pelanggan listrik didominasi oleh kelompok rumahtangga yang mencapai 91,76 persen.

Total nilai penjualan listrik di area Ponorogo untuk seluruh golongan pada tahun 2017 mencapai 270,16 milyar rupiah, meningkat 26,44 persen dibanding tahun sebelumnya yang total nilai penjualannya sebesar 213,67 miliar rupiah.

Dari sisi jumlah pelanggan PLN area Ponorogo juga selalu bertambah setiap tahunnya. Jumlah pelanggan pada tahun 2017 berjumlah 272.994 pelanggan, meningkat 4,18 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 262.044 pelanggan dengan komposisi terbesar adalah pelanggan rumahtangga yang mencapai 91,00 persen dari keseluruhan pelanggan listrik PLN.

Puncak pemakaian energi listrik rumah tangga tahun 2017 terjadi pada bulan Oktober (19,48 juta KWH) dan bulan Agustus (19,44 juta KWH).

Sementara penyaluran air bersih melalui PDAM pada tahun 2017 mencapai 3,17 juta meter kubik, naik 5,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pelanggan terbesar adalah pelanggan rumah tangga yang mencapai 94,74 persen dari total jumlah pelanggan.



INDUSTRI PENGOLAHAN

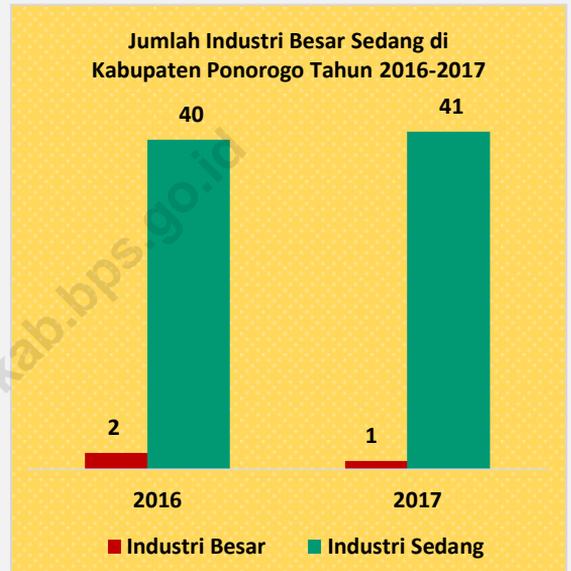
11

Menurut data dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, jumlah unit usaha industri pada tahun 2017 sebanyak 3.830 usaha yang terdiri dari industri formal sebanyak 327 usaha dan industri non formal 3.503 usaha.

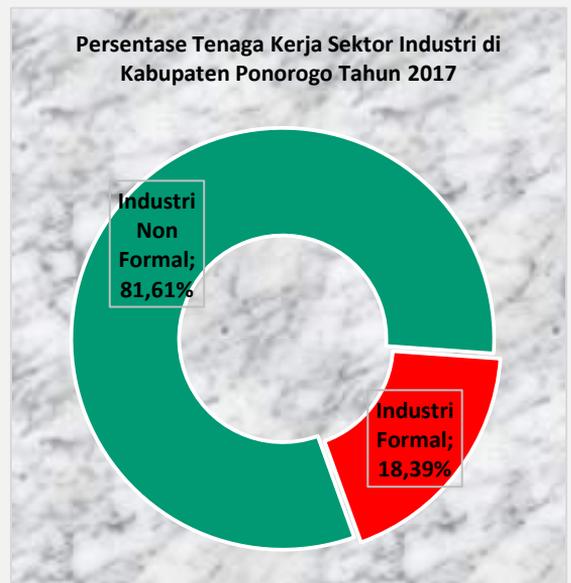
Jumlah tenaga kerja yang terserap sejumlah 12.347 orang, dengan rincian 2.271 orang bekerja pada industri formal dan 10.076 pada industri non formal. Dengan kata lain kategori industri non formal mampu menyerap tenaga kerja hingga 81,61 persen dari keseluruhan tenaga kerja industri.

Sementara dari hasil Survei Perusahaan Industri Tahunan tercatat jumlah industri klasifikasi besar (100 orang pekerja atau lebih) dan industri klasifikasi sedang/menengah (20-99 orang pekerja) di Kabupaten Ponorogo tahun 2017 sebanyak 42 unit, dengan rincian industri sedang/menengah sebanyak 41 unit dan industri besar sejumlah 1 unit.

Perusahaan industri klasifikasi besar bergerak di bidang industri pengolahan tembakau. Sementara industri klasifikasi sedang didominasi oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri barang galian bukan logam sebanyak 13 unit dan industri makanan sebanyak 9 unit.



Sumber : Survei Perusahaan Industri Tahunan



Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo

Hotel dan Penginapan di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Hotel & Penginapan	Jumlah Kamar
2013	43	740
2014	47	762
2015	49	892
2016	49	*
2017	57	1.013

Catatan : * Data tidak tersedia

Tingkat Hunian Kamar Hotel & Penginapan Menurut Bulan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 (%)



Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo (data diolah)

Ponorogo dikenal dengan julukan kota reog, karena merupakan tempat lahirnya kesenian reog yang kini menjadi salah satu ikon wisata Jawa Timur. Festival Reog tahunan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari lahir Kota Ponorogo dan menjadi salah satu jadwal kalender wisata yang sayang untuk dilewatkan.

Selain wisata budaya, wisata alam, wisata kuliner, dan wisata religi juga menjadi potensi yang patut dikembangkan dan dipromosikan secara lebih intensif. Berbagai objek wisata menarik tersebut diharapkan mampu menarik minat turis domestik maupun mancanegara untuk berkunjung.

Dalam rangka menunjang sub sektor kepariwisataan ini, perlu kiranya tersedia sarana hotel dan penginapan yang memadai. Di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 terdapat 19 hotel/losmen dan 38 penginapan dengan total jumlah kamar tersedia mencapai 1.013 kamar, yang siap menerima tamu baik wisatawan domestik maupun luar negeri.

Rata-rata tingkat hunian kamar hotel selama tahun 2017 adalah 40,45 persen, lebih rendah dibanding tahun 2016 (50,44 persen). Tingkat hunian tertinggi terjadi pada bulan April yang mencapai 48,05 persen, bertepatan dengan adanya kunjungan penceramah Zakir Naik ke Unida Gontor dan kunjungan Kemensos kepada korban bencana longsor di Ponorogo. Banyaknya relawan yang datang untuk membantu penanganan bencana membuat tingkat hunian kamar meningkat.

Salah satu prasarana transportasi dalam kegiatan perekonomian dan mobilitas penduduk adalah tersedianya jalan yang baik. Seiring dengan meningkatnya pembangunan nasional di Kabupaten Ponorogo, senantiasa selalu terjadi perbaikan dan pembangunan baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten yang ada.

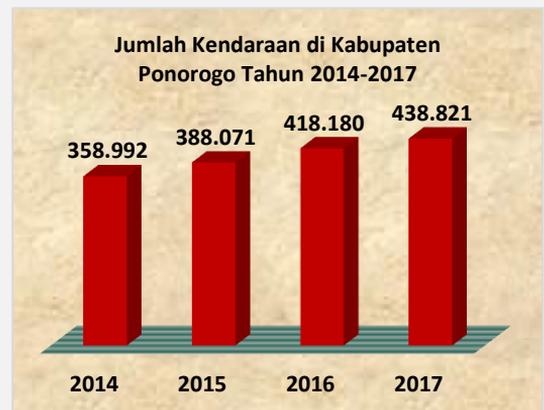
Keseluruhan panjang jalan yang ada di Kabupaten Ponorogo adalah 1.002,58 km dengan rincian jalan negara sepanjang 42,76 km, jalan provinsi sepanjang 43,71 km dan jalan kabupaten sepanjang 916,11 km. Bila dilihat menurut jenis permukaannya, keseluruhan panjang jalan yang telah diaspal mencapai 873,59 km, makadam (kerikil) 107,93 km dan jalan tanah 21,06 km.

Jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun juga terus meningkat. Tercatat jumlah kendaraan selama kurun waktu 4 tahun terakhir naik 22,24 persen dari 359 ribu unit di tahun 2014 menjadi 439 ribu unit di tahun 2017. Jenis kendaraan didominasi oleh kendaraan bermotor roda dua yang mencapai 390 ribu unit (89 persen) dari total kendaraan tahun 2017.

Kinerja jasa pelayanan pos mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Peningkatan jasa layanan pos tahun 2017 terutama berasal dari layanan surat luar negeri yang meningkat 1,05 persen dibanding tahun 2016. Sementara untuk layanan surat dalam negeri dan paket terus menurun karena kalah bersaing dengan surat elektronik dan media sosial yang lebih cepat dan murah serta berbagai jasa kurir lainnya.



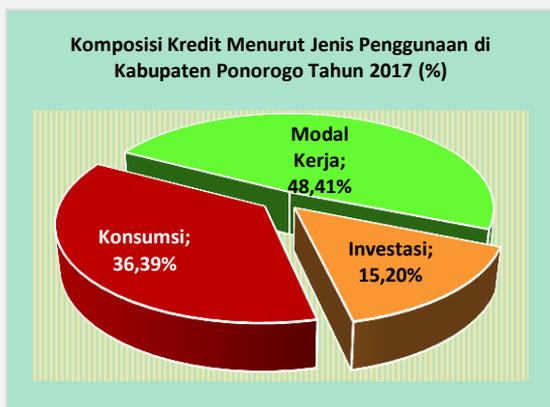
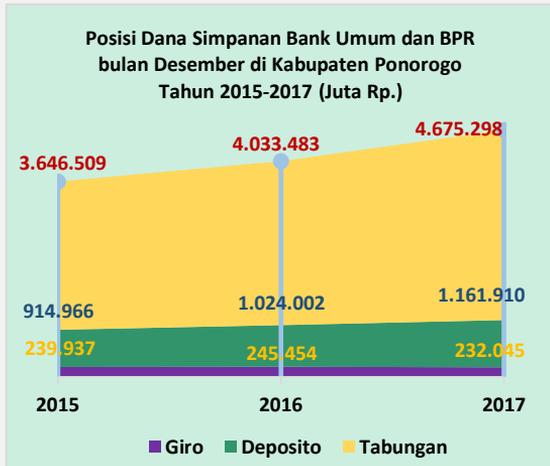
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo



Sumber : UPT. Dispenda Prov. Jatim di Ponorogo



Sumber : PT. POS Indonesia Kabupaten Ponorogo



Sumber : Bank Indonesia Cabang Kediri

Posisi simpanan masyarakat di bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Ponorogo pada akhir tahun 2017 mencapai 6,07 triliun rupiah. Komposisi simpanan terbesar dalam bentuk tabungan sebesar 77,03 persen atau mencapai 4,68 triliun rupiah. Selanjutnya adalah dalam bentuk simpanan berjangka/deposito sebesar 1,16 triliun rupiah (19,14 persen) dan giro sebesar 232,05 milyar rupiah (3,82 persen).

Kinerja industri perbankan bisa terpantau salah satunya dari kredit yang diberikan. Pertumbuhan kredit yang diberikan bank umum dan BPR pada tahun 2017 sebesar 9,17 persen, sedikit lebih lambat dibanding pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 13,07 persen. Posisi kredit pada akhir tahun 2017 tercatat mencapai 4,46 triliun rupiah.

Jenis kredit modal kerja yang komposisinya paling besar yaitu 48,47 persen naik 13,54 persen dari 1,90 triliun rupiah (2016) menjadi 2,16 triliun rupiah (2017). Sementara kredit investasi dan konsumsi naik masing-masing 5,09 persen (investasi) dan 5,48 persen (konsumsi) dari tahun 2016.

Menurut klasifikasi lapangan usaha, ternyata sebagian besar kredit diberikan untuk usaha yang bergerak di sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai 2,15 triliun rupiah atau 75,24 persen dari total pinjaman untuk seluruh lapangan usaha.



PENGELUARAN PENDUDUK

15

Pendapatan masyarakat dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya data tentang pendapatan riil penduduk sangat sulit untuk didapatkan. Oleh karena itu digunakan pendekatan melalui nilai konsumsi, baik makanan maupun non makanan yang selanjutnya akan menghasilkan indikator pengeluaran perkapita.

Pada tahun 2017, 59,24 persen penduduk Kabupaten Ponorogo telah memiliki pengeluaran perkapita sebulan lebih dari 500.000 rupiah. Persentase ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (41,32 persen). Dari tahun ke tahun penduduk Kabupaten Ponorogo cenderung beralih dari kelompok pengeluaran rendah ke kelompok pengeluaran yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat.

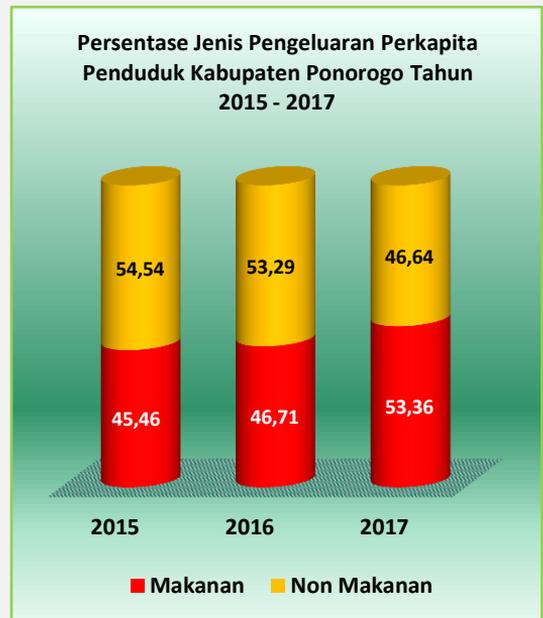
Dilihat dari jenis pengeluaran yang dikonsumsi, pada tahun 2017 pengeluaran makanan lebih dominan dibanding dengan pengeluaran non makanan yaitu 53,36 persen. Pengeluaran makanan sebagian besar digunakan untuk pembelian makanan dan minuman jadi (29,41 persen) serta padi-padian (14,40 persen).

Secara nominal rata-rata konsumsi per kapita sebulan penduduk Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Meskipun pada tahun 2017 masih cukup rendah yaitu sebesar Rp. 728.446, lebih rendah dari rata-rata konsumsi per kapita Jawa Timur yang mencapai Rp. 938.801.

Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2017

Pengeluaran perkapita	Tahun		
	2015	2016	2017
≤ 199.999	3,49	1,20	0,10
200.000-299.999	20,56	18,78	10,78
300.000-499.999	31,96	38,70	29,88
500.000-749.999	17,92	19,50	27,50
750.000-999.999	11,85	7,74	11,89
≥ 1.000.000	14,23	14,08	19,85
Total	100,00	100,00	100,00

Persentase Jenis Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 - 2017



Sumber : Data Susenas 2015-2017



Kepemilikan SIUP menurut Golongan Usaha di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2017

Golongan	2016	2017
Besar	2	5
Menengah	112	64
Kecil	635	554
Mikro	246	290
Total	995	913

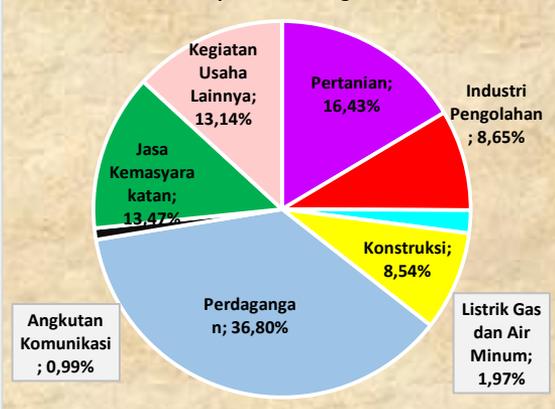
Pada tahun 2017 jumlah kepemilikan surat ijin usaha perdagangan (SIUP) yang telah diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Ponorogo mencapai 913 ijin usaha dengan komposisi usaha perdagangan skala besar sebesar 0,55 persen, usaha perdagangan skala menengah 7,01 persen, skala kecil 60,68 persen dan usaha perdagangan skala mikro 31,76 persen. Dengan demikian terlihat bahwa sektor perdagangan di Kabupaten Ponorogo sebagian besar digerakkan oleh usaha skala kecil dan mikro.

Banyaknya Usaha yang Mendaftar Ijin Menurut Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2017



Sebagian besar usaha perdagangan yang memiliki SIUP berada di Kecamatan Ponorogo (26,40 persen) dan Kecamatan Babadan dan Jenangan (masing-masing 7,67 persen). Usaha perdagangan skala besar terdapat di Kecamatan Ponorogo (4 unit) dan Kecamatan Jenangan (1 unit).

Perusahaan yang Mendaftar Ijin Menurut Sektor Usaha di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017



Dari 913 usaha yang mendaftar pada tahun 2017, sebesar 83,57 persen diantaranya memiliki bentuk usaha perseorangan, 11,94 persen memiliki bentuk usaha CV dan 4,49 persen sisanya adalah usaha dalam bentuk PT dan Koperasi. Dibanding tahun 2016, jumlah usaha yang mendaftar pada tahun 2017 menurun 8,24 persen.

Sementara bila dilihat menurut sektor usahanya, sebagian besar usaha yang mendaftar bergerak di sektor perdagangan (36,80 persen), sektor pertanian (16,43 persen), dan sektor jasa kemasyarakatan (13,47 persen).

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo



PENDAPATAN REGIONAL

17

Potensi perekonomian suatu wilayah dicerminkan oleh PDRB yang nilainya merupakan agregat nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut. PDRB merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) menggambarkan produksi riil yang dipengaruhi oleh perubahan harga. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (adhk) menggambarkan pertumbuhan riil dari tahun ke tahun tanpa dipengaruhi perubahan harga/inflasi.

PDRB Kabupaten Ponorogo tahun 2017 atas dasar harga berlaku sebesar 17,76 triliun rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 12,93 triliun rupiah. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan kategori yang paling besar kontribusinya dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar 29,03 persen meski dari tahun ke tahun kontribusinya cenderung semakin menurun. Sementara kategori yang kontribusinya paling kecil adalah Pengadaan Listrik dan Gas (0,08 persen).

PDRB per kapita (adhb) penduduk Kabupaten Ponorogo selama tahun 2017 sebesar 20,42 juta rupiah, naik 8,03 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 18,90 juta rupiah per tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 mencapai 5,10 persen, lebih lambat dibanding tahun 2016 yang sebesar 5,29 persen. Kategori yang tumbuh paling cepat adalah kategori transportasi dan pergudangan yang mencapai 9,42 persen.



Sumber : PDRB Kabupaten Ponorogo 2013-2017



**PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi
Di Satuan Wilayah Pembangunan Madiun dan sekitarnya
Tahun 2017**

Kab./Kota	PDRB ADHB (Milyar Rp.)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Kab. Pacitan	13.810,3	4,98
Kab. Ponorogo	17.760,4	5,10
Kab. Madiun	16.416,6	5,42
Kab. Magetan	16.343,4	5,09
Kab. Ngawi	17.810,6	5,07
Kota Madiun	12.140,2	5,93
JAWA TIMUR	2.019.199,7	5,45

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

**Perbandingan IPM
Di Satuan Wilayah Pembangunan Madiun dan sekitarnya
Tahun 2014-2017**

Kab./Kota	2014	2015	2016*	2017**
Kab. Pacitan	63,81	64,92	65,74	66,51
Kab. Ponorogo	67,40	68,16	68,93	69,26
Kab. Madiun	68,60	69,39	69,67	70,27
Kab. Magetan	70,29	71,39	71,94	72,60
Kab. Ngawi	67,78	68,32	68,96	69,27
Kota Madiun	78,81	79,48	80,01	80,13
Jawa Timur	68,14	68,95	69,74	70,27

Keterangan : *) angka sementara
**) angka sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Bila dibandingkan dengan total PDRB Jawa Timur yang mencapai 2.019,20 triliun rupiah pada tahun 2017, PDRB Kabupaten Ponorogo menyumbang peranan yang relatif kecil yaitu 0,87 persen. Namun demikian bila melihat keterbandingan antar Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Madiun dan sekitarnya, PDRB Kabupaten Ponorogo memiliki nominal terbesar setelah Kabupaten Ngawi.

Meski mempunyai nominal PDRB yang relatif besar di Satuan Wilayah Pembangunan Madiun dan sekitarnya namun dari sisi pertumbuhan, PDRB Kabupaten Ponorogo tumbuh lebih lambat dibanding Kota Madiun (5,93 persen) dan Kabupaten Madiun (5,42 persen) pada tahun 2017.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 sebesar 69,26, berada di urutan kelima diantara kabupaten/kota di Satuan Wilayah Pembangunan Madiun dan sekitarnya, dan masih lebih rendah dibanding IPM Provinsi Jawa Timur yang mencapai 70,27.

Dari sisi pertumbuhannya, IPM Kabupaten Ponorogo meningkat 0,48 persen, menempati peringkat keempat diantara kabupaten/kota di Satuan Wilayah Pembangunan Madiun dan sekitarnya. Kabupaten Pacitan merupakan wilayah yang pertumbuhan IPM-nya paling tinggi selama tahun 2016-2017 yaitu 1,17 persen.

Penduduk mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan suatu wilayah. Jumlah penduduk dan komposisinya akan berpengaruh besar pada kegiatan pembangunan yang berjalan di suatu wilayah.

Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo mencapai 869.894 jiwa dengan komposisi 434.793 laki-laki (49,98 persen) dan 435.101 perempuan (50,02 persen). Populasi ini adalah yang terbesar bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Madiun dan sekitarnya. Namun pada tingkat provinsi, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo hanya mencakup 2,21 persen dari seluruh penduduk di Jawa Timur.

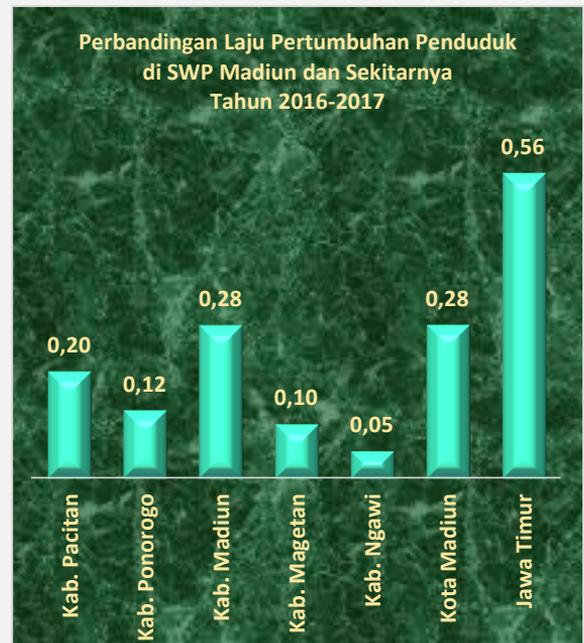
Bila diperhatikan menurut komposisi jenis kelamin, seluruh kabupaten/kota di Satuan Wilayah Madiun dan sekitarnya mempunyai komposisi penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki dengan rata-rata *sex ratio* sebesar 96,19.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ponorogo selama tahun 2016-2017 cukup rendah yaitu 0,12 persen. Meski pada tingkat Satuan Wilayah Pembangunan Madiun dan sekitarnya masih lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Magetan (0,10 persen) dan Kabupaten Ngawi (0,05 persen). Angka ini juga jauh lebih rendah dibanding laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur yang mencapai 0,56 persen selama tahun 2016-2017.

**Perbandingan Jumlah Penduduk
Di Satuan Wilayah Pembangunan Madiun dan sekitarnya
Tahun 2017**

Kab./Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Kab. Pacitan	270.192	283.196	553.388
Kab. Ponorogo	434.793	435.101	869.894
Kab. Madiun	335.588	344.300	679.888
Kab. Magetan	306.112	322.497	628.609
Kab. Ngawi	405.796	424.103	829.899
Kota Madiun	85.203	90.896	176.099
JAWA TIMUR	19.397.878	19.895.094	39.292.972

Sumber : Proyeksi Penduduk 2017



Sumber : Proyeksi Penduduk 2016-2017

**Tingkat Pengangguran Terbuka
Di Satuan Wilayah Pembangunan Madiun dan sekitarnya
Tahun 2014-2017 ***

Kab./Kota	2014	2015	2017
Kab. Pacitan	1,08	0,97	0,85
Kab. Ponorogo	3,66	3,68	3,76
Kab. Madiun	3,38	6,99	3,19
Kab. Magetan	4,28	6,05	3,80
Kab. Ngawi	5,61	3,99	5,76
Kota Madiun	6,93	5,10	4,26
Jawa Timur	4,19	4,47	4,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (*2016 tidak tersedia)

**Persentase Penduduk Miskin
Di Satuan Wilayah Pembangunan Madiun dan sekitarnya
Tahun 2016 - 2017 (%)**

Kab./Kota	2016	2017
Kab. Pacitan	15,49	15,42
Kab. Ponorogo	11,75	11,39
Kab. Madiun	12,69	12,28
Kab. Magetan	11,03	10,48
Kab. Ngawi	15,27	14,91
Kota Madiun	5,16	4,94
JAWA TIMUR	12,05	11,77

*) Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada tahun 2017 sebesar 4,00 persen, lebih rendah dibanding tahun 2015 yang berkisar pada angka 4,47 persen.

Di Kabupaten Ponorogo menunjukkan kecenderungan sebaliknya dengan Jawa Timur yaitu meningkat tipis dan berada pada besaran 3,76 persen atau meningkat 0,08 persen poin dibanding tahun 2015. Namun pada tingkat Satuan Wilayah Pembangunan Madiun dan sekitarnya, TPT Kabupaten Ponorogo masih lebih rendah dibanding Kabupaten Magetan (3,80 persen), Kota Madiun (4,26 persen) dan Kabupaten Ngawi (5,76 persen).

Sementara bila dilihat menurut persentase penduduk miskinnya, pada tahun 2017 di Kabupaten Ponorogo terdapat 11,39 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Angka ini lebih rendah dari rata-rata persentase penduduk miskin Jawa Timur yang sebesar 11,77 persen. Dibanding kabupaten/kota lain di Satuan Wilayah Pembangunan Madiun dan sekitarnya, Kabupaten Ponorogo juga memiliki persentase penduduk miskin terendah setelah Kota Madiun dan Kabupaten Magetan. Meski secara persentase rendah namun secara absolut jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Ponorogo masih mencapai 99,03 ribu jiwa.

Secara umum persentase penduduk miskin di Jawa Timur maupun Kabupaten/Kota tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun 2016, kecuali Kabupaten Jember, Kota Kediri, Kota Blitar dan Kota Mojokerto.

Lampiran

<https://keprologokab.bps.go.id>

Tabel 1

**Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Kabupaten Ponorogo
Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur
Tahun 2017**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
0 - 4	30.527	28.703	59.230	106,35
5 - 9	30.432	28.695	59.127	106,05
10 - 14	33.323	31.193	64.516	106,83
15 - 19	36.541	29.872	66.413	122,33
20 - 24	27.781	23.952	51.733	115,99
25 - 29	27.559	26.951	54.510	102,26
30 - 34	28.675	28.736	57.411	99,79
35 - 39	31.868	32.308	64.176	98,64
40 - 44	33.450	34.449	67.899	97,10
45 - 49	32.883	34.210	67.093	96,12
50 - 54	30.896	32.670	63.566	94,57
55 - 59	27.741	27.718	55.459	100,08
60 - 64	21.948	21.297	43.245	103,06
65 - 69	15.674	17.484	33.158	89,65
70 - 74	11.661	14.684	26.345	79,41
75+	13.834	22.179	36.013	62,37
TOTAL	434.793	435.101	869.894	99,93

Sumber : Proyeksi Penduduk 2017

**Proyeksi Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014-2017**

Kabupaten/Kota		2014	2015	2016	2017
01	Kabupaten Pacitan	549.481	550.986	552.307	553.388
02	Kabupaten Ponorogo	865.809	867.393	868.814	869.894
03	Kabupaten Trenggalek	686.781	689.200	691.295	693.104
04	Kabupaten Tulungagung	1.015.974	1.021.190	1.026.101	1.030.790
05	Kabupaten Blitar	1.140.793	1.145.396	1.149.710	1.153.803
06	Kabupaten Kediri	1.538.929	1.546.883	1.554.385	1.561.392
07	Kabupaten Malang	2.527.087	2.544.315	2.560.675	2.576.596
08	Kabupaten Lumajang	1.026.378	1.030.193	1.033.698	1.036.823
09	Kabupaten Jember	2.394.608	2.407.115	2.419.000	2.430.185
10	Kabupaten Banyuwangi	1.588.082	1.594.083	1.599.811	1.604.897
11	Kabupaten Bondowoso	756.989	761.205	765.094	768.912
12	Kabupaten Situbondo	666.013	669.713	673.282	676.703
13	Kabupaten Probolinggo	1.132.690	1.140.480	1.148.012	1.155.214
14	Kabupaten Pasuruan	1.569.507	1.581.787	1.593.683	1.605.307
15	Kabupaten Sidoarjo	2.083.924	2.117.279	2.150.482	2.183.682
16	Kabupaten Mojokerto	1.070.486	1.080.389	1.090.075	1.099.504
17	Kabupaten Jombang	1.234.501	1.240.985	1.247.303	1.253.078
18	Kabupaten Nganjuk	1.037.723	1.041.716	1.045.375	1.048.799
19	Kabupaten Madiun	673.988	676.087	677.993	679.888
20	Kabupaten Magetan	626.614	627.413	627.984	628.609
21	Kabupaten Ngawi	827.829	828.783	829.480	829.899
22	Kabupaten Bojonegoro	1.232.386	1.236.607	1.240.383	1.243.906
23	Kabupaten Tuban	1.147.097	1.152.915	1.158.374	1.163.614
24	Kabupaten Lamongan	1.187.084	1.187.795	1.188.193	1.188.478
25	Kabupaten Gresik	1.241.613	1.256.313	1.270.702	1.285.018
26	Kabupaten Bangkalan	945.821	954.305	962.773	970.894
27	Kabupaten Sampang	925.911	936.801	947.614	958.082
28	Kabupaten Pamekasan	836.224	845.314	854.194	863.004
29	Kabupaten Sumenep	1.067.202	1.072.113	1.076.805	1.081.204
71	Kota Kediri	278.072	280.004	281.978	284.003
72	Kota Blitar	136.903	137.908	139.117	139.995
73	Kota Malang	845.973	851.298	856.410	861.414
74	Kota Probolinggo	226.777	229.013	231.112	233.123
75	Kota Pasuruan	193.329	194.815	196.202	197.696
76	Kota Mojokerto	124.719	125.706	126.404	127.279
77	Kota Madiun	174.373	174.995	175.607	176.099
78	Kota Surabaya	2.833.924	2.848.583	2.862.406	2.874.699
79	Kota Batu	198.608	200.485	202.319	203.997
JAWA TIMUR		38.610.202	38.847.561	39.075.152	39.292.972

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Timur 2017

Tabel 3

**Umur Harapan Hidup
Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014-2017
(Tahun)**

Kabupaten/Kota		2014	2015	2016	2017
01	Kabupaten Pacitan	70,75	71,05	71,18	71,31
02	Kabupaten Ponorogo	71,88	72,08	72,18	72,27
03	Kabupaten Trenggalek	72,51	72,91	73,03	73,15
04	Kabupaten Tulungagung	72,88	73,28	73,40	73,53
05	Kabupaten Blitar	72,50	72,80	72,89	72,99
06	Kabupaten Kediri	72,04	72,14	72,20	72,25
07	Kabupaten Malang	71,78	71,98	72,05	72,12
08	Kabupaten Lumajang	69,07	69,27	69,38	69,50
09	Kabupaten Jember	67,80	68,20	68,37	68,54
10	Kabupaten Banyuwangi	69,93	70,03	70,11	70,19
11	Kabupaten Bondowoso	65,43	65,73	65,89	66,04
12	Kabupaten Situbondo	68,08	68,28	68,41	68,53
13	Kabupaten Probolinggo	65,75	66,15	66,31	66,47
14	Kabupaten Pasuruan	69,83	69,83	69,86	69,90
15	Kabupaten Sidoarjo	73,43	73,63	73,67	73,71
16	Kabupaten Mojokerto	71,76	71,96	72,03	72,10
17	Kabupaten Jombang	71,37	71,67	71,77	71,87
18	Kabupaten Nganjuk	70,87	70,97	71,04	71,11
19	Kabupaten Madiun	69,76	70,36	70,55	70,77
20	Kabupaten Magetan	71,91	72,01	72,09	72,16
21	Kabupaten Ngawi	71,33	71,53	71,63	71,74
22	Kabupaten Bojonegoro	70,11	70,51	70,67	70,83
23	Kabupaten Tuban	70,25	70,55	70,67	70,80
24	Kabupaten Lamongan	71,47	71,67	71,77	71,87
25	Kabupaten Gresik	72,20	72,30	72,33	72,36
26	Kabupaten Bangkalan	69,62	69,72	69,77	69,82
27	Kabupaten Sampang	67,48	67,58	67,62	67,67
28	Kabupaten Pamekasan	66,56	66,86	66,95	67,05
29	Kabupaten Sumenep	70,02	70,42	70,56	70,71
71	Kota Kediri	73,52	73,62	73,65	73,69
72	Kota Blitar	72,70	73,00	73,09	73,17
73	Kota Malang	72,30	72,60	72,68	72,77
74	Kota Probolinggo	69,52	69,72	69,79	69,86
75	Kota Pasuruan	70,54	70,84	70,93	71,02
76	Kota Mojokerto	72,39	72,69	72,78	72,86
77	Kota Madiun	72,41	72,41	72,44	72,48
78	Kota Surabaya	73,85	73,85	73,87	73,88
79	Kota Batu	72,06	72,16	72,20	72,25
JAWA TIMUR		70,45	70,68	70,74	70,80

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Tabel 4

**Angka Buta Huruf Penduduk Jawa Timur Usia 15 Tahun Ke Atas
Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2017
(persen)**

	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
01	Kabupaten Pacitan	5,29	11,77	8,64
02	Kabupaten Ponorogo	7,00	14,80	10,93
03	Kabupaten Trenggalek	3,98	9,42	6,74
04	Kabupaten Tulungagung	2,16	4,74	3,50
05	Kabupaten Blitar	4,64	11,36	8,01
06	Kabupaten Kediri	4,37	8,11	6,24
07	Kabupaten Malang	2,65	7,36	5,00
08	Kabupaten Lumajang	7,87	16,05	12,11
09	Kabupaten Jember	7,44	14,71	11,17
10	Kabupaten Banyuwangi	4,80	12,99	8,95
11	Kabupaten Bondowoso	12,42	23,95	18,41
12	Kabupaten Situbondo	9,41	20,21	15,00
13	Kabupaten Probolinggo	10,38	19,37	15,04
14	Kabupaten Pasuruan	4,45	9,60	7,07
15	Kabupaten Sidoarjo	0,59	2,10	1,34
16	Kabupaten Mojokerto	1,94	6,20	4,09
17	Kabupaten Jombang	2,95	5,34	4,16
18	Kabupaten Nganjuk	3,60	9,25	6,46
19	Kabupaten Madiun	4,95	11,49	8,29
20	Kabupaten Magetan	2,69	10,65	6,82
21	Kabupaten Ngawi	7,53	16,05	11,93
22	Kabupaten Bojonegoro	6,62	13,99	10,38
23	Kabupaten Tuban	6,32	16,61	11,58
24	Kabupaten Lamongan	4,77	12,83	8,97
25	Kabupaten Gresik	1,60	5,91	3,80
26	Kabupaten Bangkalan	8,91	20,25	14,99
27	Kabupaten Sampang	15,58	27,61	21,88
28	Kabupaten Pamekasan	9,17	18,75	14,17
29	Kabupaten Sumenep	13,26	25,61	19,85
71	Kota Kediri	0,89	3,61	2,26
72	Kota Blitar	1,16	3,26	2,24
73	Kota Malang	0,77	3,59	2,21
74	Kota Probolinggo	4,24	10,40	7,37
75	Kota Pasuruan	1,53	5,96	3,79
76	Kota Mojokerto	0,30	3,61	2,00
77	Kota Madiun	0,99	2,42	1,74
78	Kota Surabaya	0,85	1,64	1,26
79	Kota Batu	1,57	4,45	3,00
	JAWA TIMUR	5,00	11,22	8,18

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Timur 2017

Tabel 5

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Bulan Agustus Tahun 2012-2017
(persen)***

	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2017
01	Kabupaten Pacitan	1,02	0,99	1,08	0,97	0,85
02	Kabupaten Ponorogo	3,14	3,25	3,66	3,68	3,76
03	Kabupaten Trenggalek	2,98	4,04	4,20	2,46	3,48
04	Kabupaten Tulungagung	3,10	2,71	2,42	3,95	2,27
05	Kabupaten Blitar	2,82	3,64	3,08	2,79	2,99
06	Kabupaten Kediri	4,08	4,65	4,91	5,02	3,18
07	Kabupaten Malang	3,75	5,17	4,83	4,95	4,60
08	Kabupaten Lumajang	4,60	2,01	2,83	2,60	2,91
09	Kabupaten Jember	3,77	3,94	4,64	4,77	5,16
10	Kabupaten Banyuwangi	3,41	4,65	7,17	2,55	3,07
11	Kabupaten Bondowoso	3,60	2,04	3,72	1,75	2,09
12	Kabupaten Situbondo	3,33	3,01	4,15	3,57	1,49
13	Kabupaten Probolinggo	1,92	3,30	1,47	2,51	2,89
14	Kabupaten Pasuruan	6,38	4,34	4,43	6,41	4,97
15	Kabupaten Sidoarjo	5,37	4,12	3,88	6,30	4,97
16	Kabupaten Mojokerto	3,35	3,16	3,81	4,05	5,00
17	Kabupaten Jombang	6,72	5,59	4,39	6,11	5,14
18	Kabupaten Nganjuk	4,09	4,73	3,93	2,10	3,23
19	Kabupaten Madiun	3,99	4,63	3,38	6,99	3,19
20	Kabupaten Magetan	3,64	2,96	4,28	6,05	3,80
21	Kabupaten Ngawi	2,94	4,97	5,61	3,99	5,76
22	Kabupaten Bojonegoro	3,42	5,81	3,21	5,01	3,64
23	Kabupaten Tuban	4,13	4,30	3,63	3,03	3,39
24	Kabupaten Lamongan	4,75	4,93	4,30	4,10	4,12
25	Kabupaten Gresik	6,78	4,55	5,06	5,67	4,54
26	Kabupaten Bangkalan	5,13	6,78	5,68	5,00	4,48
27	Kabupaten Sampang	1,71	4,68	2,22	2,51	2,48
28	Kabupaten Pamekasan	2,29	2,17	2,14	4,26	3,91
29	Kabupaten Sumenep	1,14	2,56	1,01	2,07	1,83
71	Kota Kediri	8,12	7,92	7,66	8,46	4,68
72	Kota Blitar	3,68	6,17	5,71	3,80	3,76
73	Kota Malang	7,96	7,73	7,22	7,28	7,22
74	Kota Probolinggo	5,26	4,48	5,16	4,01	3,42
75	Kota Pasuruan	4,54	5,41	6,09	5,57	4,64
76	Kota Mojokerto	7,52	5,73	4,42	4,88	3,61
77	Kota Madiun	6,89	6,57	6,93	5,10	4,26
78	Kota Surabaya	5,27	5,32	5,82	7,01	5,98
79	Kota Batu	3,51	2,30	2,43	4,29	2,26
	JAWA TIMUR	4,09	4,30	4,19	4,47	4,00

Keterangan: *) data tahun 2016 tidak tersedia

Sumber : Hasil Sakernas Jawa Timur 2012-2017

Tabel 6

**Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota
Dan Luas Lantai Rumah Tahun 2017
(persen)**

Kabupaten/Kota		Luas Lantai (m ²)					Total
		< 20	20 - 49	50 - 99	100 - 149	150 +	
01	Kabupaten Pacitan	0,42	13,03	61,12	17,25	8,18	100,00
02	Kabupaten Ponorogo	0,72	6,26	55,66	26,46	10,90	100,00
03	Kabupaten Trenggalek	0,95	15,98	58,00	18,32	6,75	100,00
04	Kabupaten Tulungagung	0,65	14,15	60,45	17,62	7,14	100,00
05	Kabupaten Blitar	1,50	10,07	63,44	16,46	8,53	100,00
06	Kabupaten Kediri	2,40	17,64	56,68	15,82	7,47	100,00
07	Kabupaten Malang	1,01	18,17	54,87	16,46	9,50	100,00
08	Kabupaten Lumajang	0,74	25,35	59,24	9,91	4,76	100,00
09	Kabupaten Jember	1,53	23,89	59,91	10,89	3,79	100,00
10	Kabupaten Banyuwangi	1,57	21,02	55,41	15,86	6,13	100,00
11	Kabupaten Bondowoso	0,78	31,42	56,45	8,21	3,14	100,00
12	Kabupaten Situbondo	3,56	39,94	47,28	5,39	3,82	100,00
13	Kabupaten Probolinggo	1,23	23,40	62,87	8,60	3,89	100,00
14	Kabupaten Pasuruan	1,52	28,55	53,78	10,37	5,78	100,00
15	Kabupaten Sidoarjo	7,41	13,75	44,72	20,11	14,00	100,00
16	Kabupaten Mojokerto	3,38	9,19	59,65	18,05	9,73	100,00
17	Kabupaten Jombang	0,62	15,25	62,47	13,89	7,77	100,00
18	Kabupaten Nganjuk	0,89	19,32	58,43	14,56	6,80	100,00
19	Kabupaten Madiun	0,12	6,66	41,49	30,48	21,26	100,00
20	Kabupaten Magetan	0,12	8,14	44,52	25,06	22,16	100,00
21	Kabupaten Ngawi	1,20	7,61	36,71	31,72	22,76	100,00
22	Kabupaten Bojonegoro	0,80	7,59	48,92	19,87	22,81	100,00
23	Kabupaten Tuban	1,79	18,38	46,46	19,35	14,02	100,00
24	Kabupaten Lamongan	0,57	12,32	52,31	20,94	13,87	100,00
25	Kabupaten Gresik	7,49	10,16	52,01	22,73	7,62	100,00
26	Kabupaten Bangkalan	1,46	24,77	56,10	14,30	3,37	100,00
27	Kabupaten Sampang	0,09	6,99	39,85	34,27	18,80	100,00
28	Kabupaten Pamekasan	1,08	15,20	58,99	18,36	6,38	100,00
29	Kabupaten Sumenep	0,51	18,46	62,74	13,08	5,21	100,00
71	Kota Kediri	5,20	24,99	43,12	13,35	13,35	100,00
72	Kota Blitar	4,57	19,85	39,85	21,24	14,50	100,00
73	Kota Malang	14,35	22,49	38,04	11,74	13,38	100,00
74	Kota Probolinggo	3,10	23,01	47,22	15,59	11,08	100,00
75	Kota Pasuruan	4,23	27,38	39,50	15,65	13,23	100,00
76	Kota Mojokerto	4,40	14,87	38,46	25,14	17,13	100,00
77	Kota Madiun	10,03	14,61	33,62	20,45	21,29	100,00
78	Kota Surabaya	26,14	19,58	27,95	15,38	10,95	100,00
79	Kota Batu	0,29	22,87	47,84	19,24	9,76	100,00
JAWA TIMUR		3,99	17,65	51,75	16,81	9,79	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Timur 2017

Tabel 7

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017**

Kabupaten/Kota		IPM	Pertumbuhan	Ranking
01	Kabupaten Pacitan	66,51	1,17	29
02	Kabupaten Ponorogo	69,26	0,48	23
03	Kabupaten Trenggalek	68,10	0,47	25
04	Kabupaten Tulungagung	71,24	0,59	14
05	Kabupaten Blitar	69,33	0,65	21
06	Kabupaten Kediri	70,47	0,86	18
07	Kabupaten Malang	68,47	1,42	24
08	Kabupaten Lumajang	64,23	0,77	36
09	Kabupaten Jember	64,96	1,48	31
10	Kabupaten Banyuwangi	69,64	0,93	20
11	Kabupaten Bondowoso	64,75	0,36	33
12	Kabupaten Situbondo	65,68	0,92	30
13	Kabupaten Probolinggo	64,28	0,25	34
14	Kabupaten Pasuruan	66,69	1,49	28
15	Kabupaten Sidoarjo	78,70	0,68	4
16	Kabupaten Mojokerto	72,36	1,37	12
17	Kabupaten Jombang	70,88	1,21	16
18	Kabupaten Nganjuk	70,69	0,27	17
19	Kabupaten Madiun	70,27	0,86	19
20	Kabupaten Magetan	72,60	0,92	11
21	Kabupaten Ngawi	69,27	0,45	22
22	Kabupaten Bojonegoro	67,28	0,82	26
23	Kabupaten Tuban	66,77	0,88	27
24	Kabupaten Lamongan	71,11	1,09	15
25	Kabupaten Gresik	74,84	0,51	8
26	Kabupaten Bangkalan	62,30	0,39	37
27	Kabupaten Sampang	59,90	1,37	38
28	Kabupaten Pamekasan	64,93	1,48	32
29	Kabupaten Sumenep	64,28	1,36	34
71	Kota Kediri	77,13	1,05	5
72	Kota Blitar	77,10	0,51	6
73	Kota Malang	80,65	0,24	2
74	Kota Probolinggo	72,09	0,83	13
75	Kota Pasuruan	74,39	0,38	9
76	Kota Mojokerto	76,77	0,51	7
77	Kota Madiun	80,13	0,15	3
78	Kota Surabaya	81,07	0,86	1
79	Kota Batu	74,26	0,94	10
JAWA TIMUR		70,27	0,76	15

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2017

Tabel 8

**Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kabupaten/Kota
Dan Jenis Pengeluaran Makanan Dan Non Makanan
Tahun 2017**

Kabupaten/Kota		Pengeluaran Perkapita Sebulan					
		Rangkuman (Dalam Rupiah)			Persentase		
		Pengeluaran Makanan	Pengeluaran Non Makanan	Jumlah	Pengeluaran Makanan	Pengeluaran Non Makanan	Jumlah
01	Kabupaten Pacitan	406.358	314.757	721.115	56,35	43,65	100,00
02	Kabupaten Ponorogo	388.689	339.756	728.446	53,36	46,64	100,00
03	Kabupaten Trenggalek	359.249	319.916	679.165	52,90	47,10	100,00
04	Kabupaten Tulungagung	404.942	386.660	791.602	51,15	48,85	100,00
05	Kabupaten Blitar	402.633	385.960	788.593	51,06	48,94	100,00
06	Kabupaten Kediri	408.383	352.301	760.684	53,69	46,31	100,00
07	Kabupaten Malang	480.986	406.709	887.695	54,18	45,82	100,00
08	Kabupaten Lumajang	365.184	266.212	631.396	57,84	42,16	100,00
09	Kabupaten Jember	351.840	260.299	612.139	57,48	42,52	100,00
10	Kabupaten Banyuwangi	432.350	419.942	852.292	50,73	49,27	100,00
11	Kabupaten Bondowoso	372.145	273.911	646.056	57,60	42,40	100,00
12	Kabupaten Situbondo	337.261	264.141	601.402	56,08	43,92	100,00
13	Kabupaten Probolinggo	345.817	289.319	635.136	54,45	45,55	100,00
14	Kabupaten Pasuruan	495.810	408.252	904.062	54,84	45,16	100,00
15	Kabupaten Sidoarjo	618.670	738.530	1.357.200	45,58	54,42	100,00
16	Kabupaten Mojokerto	554.404	522.482	1.076.886	51,48	48,52	100,00
17	Kabupaten Jombang	455.867	393.625	849.492	53,66	46,34	100,00
18	Kabupaten Nganjuk	421.446	331.525	752.971	55,97	44,03	100,00
19	Kabupaten Madiun	422.919	382.376	805.295	52,52	47,48	100,00
20	Kabupaten Magetan	448.957	520.638	969.595	46,30	53,70	100,00
21	Kabupaten Ngawi	387.264	319.458	706.722	54,80	45,20	100,00
22	Kabupaten Bojonegoro	454.781	319.304	774.085	58,75	41,25	100,00
23	Kabupaten Tuban	461.456	318.478	779.934	59,17	40,83	100,00
24	Kabupaten Lamongan	520.196	511.753	1.031.950	50,41	49,59	100,00
25	Kabupaten Gresik	622.010	581.972	1.203.982	51,66	48,34	100,00
26	Kabupaten Bangkalan	396.492	214.371	610.864	64,91	35,09	100,00
27	Kabupaten Sampang	396.834	247.366	644.200	61,60	38,40	100,00
28	Kabupaten Pamekasan	377.797	232.039	609.836	61,95	38,05	100,00
29	Kabupaten Sumenep	536.140	305.862	842.002	63,67	36,33	100,00
71	Kota Kediri	515.417	642.035	1.157.452	44,53	55,47	100,00
72	Kota Blitar	530.602	629.525	1.160.128	45,74	54,26	100,00
73	Kota Malang	632.530	1.038.695	1.671.225	37,85	62,15	100,00
74	Kota Probolinggo	499.067	724.384	1.223.451	40,79	59,21	100,00
75	Kota Pasuruan	577.070	522.848	1.099.918	52,46	47,54	100,00
76	Kota Mojokerto	561.386	710.063	1.271.450	44,15	55,85	100,00
77	Kota Madiun	584.040	782.304	1.366.344	42,74	57,26	100,00
78	Kota Surabaya	758.750	1.143.770	1.902.519	39,88	60,12	100,00
79	Kota Batu	601.888	606.208	1.208.095	49,82	50,18	100,00
JAWA TIMUR		476.861	461.940	938.801	50,79	49,21	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Timur Tahun 2017

Tabel 9

**Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
di Jawa Timur Tahun 2016-2017**

	Kabupaten/Kota	2016		2017	
		Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (000)
01	Kabupaten Pacitan	15,49	85,53	15,42	85,26
02	Kabupaten Ponorogo	11,75	102,06	11,39	99,03
03	Kabupaten Trenggalek	13,24	91,49	12,96	89,77
04	Kabupaten Tulungagung	8,23	84,35	8,04	82,80
05	Kabupaten Blitar	9,88	113,51	9,80	112,93
06	Kabupaten Kediri	12,72	197,43	12,25	191,08
07	Kabupaten Malang	11,49	293,74	11,04	283,96
08	Kabupaten Lumajang	11,22	115,91	10,87	112,65
09	Kabupaten Jember	10,97	265,10	11,00	266,90
10	Kabupaten Banyuwangi	8,79	140,45	8,64	138,54
11	Kabupaten Bondowoso	15,00	114,63	14,54	111,66
12	Kabupaten Situbondo	13,34	89,68	13,05	88,23
13	Kabupaten Probolinggo	20,98	240,47	20,52	236,72
14	Kabupaten Pasuruan	10,57	168,06	10,34	165,64
15	Kabupaten Sidoarjo	6,39	136,79	6,23	135,42
16	Kabupaten Mojokerto	10,61	115,38	10,19	111,79
17	Kabupaten Jombang	10,70	133,32	10,48	131,16
18	Kabupaten Nganjuk	12,25	127,90	11,98	125,52
19	Kabupaten Madiun	12,69	85,97	12,28	83,43
20	Kabupaten Magetan	11,03	69,24	10,48	65,87
21	Kabupaten Ngawi	15,27	126,65	14,91	123,76
22	Kabupaten Bojonegoro	14,60	180,99	14,34	178,25
23	Kabupaten Tuban	17,14	198,35	16,87	196,10
24	Kabupaten Lamongan	14,89	176,92	14,42	171,38
25	Kabupaten Gresik	13,19	167,12	12,80	164,08
26	Kabupaten Bangkalan	21,41	205,71	21,32	206,53
27	Kabupaten Sampang	24,11	227,80	23,56	225,13
28	Kabupaten Pamekasan	16,70	142,32	16,00	137,77
29	Kabupaten Sumenep	20,09	216,14	19,62	211,92
71	Kota Kediri	8,40	23,64	8,49	24,07
72	Kota Blitar	7,18	9,97	8,03	11,22
73	Kota Malang	4,33	37,03	4,17	35,89
74	Kota Probolinggo	7,97	18,37	7,84	18,23
75	Kota Pasuruan	7,62	14,93	7,53	14,85
76	Kota Mojokerto	5,73	7,24	5,73	7,28
77	Kota Madiun	5,16	9,05	4,94	8,70
78	Kota Surabaya	5,63	161,01	5,39	154,71
79	Kota Batu	4,48	9,05	4,31	8,77
	JAWA TIMUR	12,05	4.703,30	11,77	4.617,01

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2017

Tabel 10

**Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS)
Dalam Rangka Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial**

Kecamatan		PSE 2005	PPLS 2008	PPLS 2011 *	PBDT 2015
01	Ngrayun	7.136	6.551	11.220	11.758
02	Slahung	4.863	5.211	7.140	7.403
03	Bungkal	4.181	2.672	4.942	5.315
04	Sambit	4.762	3.446	5.510	5.678
05	Sawoo	8.275	5.919	8.771	9.322
06	Sooko	2.442	2.424	3.068	3.252
07	Pudak	1.364	694	1.582	1.692
08	Pulung	5.880	5.023	6.444	6.943
09	Mlarak	4.113	2.359	4.338	4.560
10	Siman	3.662	2.998	3.712	3.875
11	Jetis	3.622	3.063	4.002	4.000
12	Balong	5.623	3.230	7.834	7.835
13	Kauman	5.524	4.474	6.783	7.293
14	Jambon	5.354	3.746	7.538	7.736
15	Badegan	4.443	3.888	5.683	5.906
16	Sampung	4.040	3.462	4.632	4.531
17	Sukorejo	6.213	3.759	5.893	5.869
18	Ponorogo	4.284	3.850	4.453	4.424
19	Babadan	4.088	3.189	4.145	4.197
20	Jenangan	5.503	4.213	5.782	5.797
21	Ngebel	2.728	2.123	3.024	3.288
Jumlah		98.100	76.294	116.496	120.674

Ket. * : Cakupan PPLS 2011 diperluas terhadap 40 persen rumah tangga berpendapatan rendah.

Tabel 11

**Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Yang Pernah Mengakses
Internet Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis
Kelamin di Jawa Timur Tahun 2017**

	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
01	Kabupaten Pacitan	28,02	22,30	25,08
02	Kabupaten Ponorogo	37,04	29,36	33,19
03	Kabupaten Trenggalek	30,72	23,19	26,93
04	Kabupaten Tulungagung	37,25	31,98	34,54
05	Kabupaten Blitar	32,32	28,99	30,65
06	Kabupaten Kediri	29,49	24,66	27,08
07	Kabupaten Malang	33,05	26,32	29,70
08	Kabupaten Lumajang	21,70	16,87	19,22
09	Kabupaten Jember	22,43	18,75	20,55
10	Kabupaten Banyuwangi	30,35	25,67	28,00
11	Kabupaten Bondowoso	21,47	15,26	18,28
12	Kabupaten Situbondo	25,32	20,33	22,76
13	Kabupaten Probolinggo	21,06	13,10	16,97
14	Kabupaten Pasuruan	30,52	20,98	25,69
15	Kabupaten Sidoarjo	55,53	48,46	52,01
16	Kabupaten Mojokerto	39,67	32,46	36,06
17	Kabupaten Jombang	33,12	25,70	29,38
18	Kabupaten Nganjuk	25,60	21,83	23,70
19	Kabupaten Madiun	37,07	29,46	33,21
20	Kabupaten Magetan	34,75	27,89	31,22
21	Kabupaten Ngawi	27,89	23,06	25,41
22	Kabupaten Bojonegoro	30,93	23,17	26,99
23	Kabupaten Tuban	28,98	20,45	24,65
24	Kabupaten Lamongan	31,95	26,79	29,28
25	Kabupaten Gresik	44,66	37,64	41,11
26	Kabupaten Bangkalan	23,84	17,77	20,65
27	Kabupaten Sampang	20,41	12,80	16,48
28	Kabupaten Pamekasan	24,56	15,56	19,92
29	Kabupaten Sumenep	21,50	14,47	17,79
71	Kota Kediri	50,24	43,55	46,88
72	Kota Blitar	43,80	44,76	44,29
73	Kota Malang	61,81	55,10	58,40
74	Kota Probolinggo	42,76	35,12	38,85
75	Kota Pasuruan	42,98	37,89	40,41
76	Kota Mojokerto	50,19	43,56	46,81
77	Kota Madiun	56,10	52,65	54,31
78	Kota Surabaya	57,81	51,31	54,51
79	Kota Batu	49,67	44,50	47,10
	JAWA TIMUR	34,45	28,00	31,17

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Timur 2017

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PONOROGO**

Jl. Letjend. R. Suprpto No. 14 Ponorogo

Telp : 0352-481026 E-mail : bps3502@bps.go.id Homepage : <http://ponorogokab.bps.go.id>